



## Pengantar Redaksi

KETERBUKAAN dan kebebasan berekspresi tak selamanya menjadi *guarantee* bagi terwujudnya sikap saling menghormati. Ancaman kebebasan beragama atau berkeyakinan misalnya, terus hadir hilir mudik di depan mata. Gelombang penyesatan atas kelompok agama atau keyakinan yang dianggap berbeda, terus terjadi tiada henti.

Inilah ancaman serius bagi hak asasi manusia (HAM), yang justru terjadi di tengah suasana keterbukaan dan kebebasan ini. Sangat ironis, tentu saja. Lebih ironis lagi, ada kesan kuat, aparat pemerintah tunduk patuh dan berada dalam kendali otoritas tokoh-tokoh agama tertentu.

Tidak hanya itu, konflik komunal akibat Perber No. 8/9 tahun 2006 – revisi SKB No. 1/Ber/MDN-MAG/1969 – tentang regulasi tempat ibadah, juga terus berlangsung. Efek bola saljunya, kelompok minoritas menjadi tak punya kesempatan luas mendirikan rumah ibadah; sesuatu yang sakral dan urgen bagi ekspresi keberagamaan. Isu sentimen keagamaan juga tak kunjung pudar. Bahkan grafiknya kian menanjak.

Sejak awal 2000-an, regulasi bernuansa agama – yang acap disebut Perda (bernuansa) Syariat Islam – turut mengeruhkan suasana. Momentum otonomi daerah, 'seakan berkah' yang membuat pemerintah daerah latah atau bahkan kebablasan ramai-ramai menerbitkan regulasi

agama, yang justru mengidap banyak unsur diskriminasi.

Inilah beberapa kondisi riil di masyarakat, yang menjadi hantu bagi kebebasan memperoleh HAM, terutama kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinan. Padahal untuk kontek Indonesia, hak-hak dasar itu nyata-nyata dibenarkan dan dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

Atas dasar itu semua, kehadiran buku bertitel *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*, kendati hanya menampilkan *highlight* politisasi agama dan konflik komunal yang terjadi di beberapa wilayah saja, sengaja didedikasikan untuk perbaikan bersama bangsa Indonesia.

Buku yang diangkat dari hasil riset program *Pluralism Watch* yang dilakukan the WAHID Institute sepanjang 2005-2006, ini hadir berkat sumbangsih dan kucuran keringat dari jejaring di berbagai daerah: Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, dan Jakarta. Terima kasih sedalam-dalamnya diucapkan kepada mereka. Tanpa keterlibatan mereka, buku ini tidak akan pernah hadir.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan di the WAHID Institute, yang ikut dalam keseluruhan proses penyusunan sejak awal hingga akhir. Terima kasih juga disampaikan kepada semua yang ikut membantu, namun tidak mungkin disebut satu persatu di ruangan ini. Juga kepada para pembaca, lebih khusus siapapun yang bersedia mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam buku ini.

Akhirnya, semoga 'riset advokasi' sederhana ini turut memberi sumbangsih bagi tegaknya pluralisme dan demokrasi di negeri ini.

Selamat membaca!

Jakarta, Agustus 2007